

ANALISIS KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN WONOGIRI 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOGIRI**

ANALISIS KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN WONOGIRI

2022



ANALISIS KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN WONOGIRI 2022

Nomor Publikasi : 33120.2343

Nomor Katalog : 4101043.3312

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xiv + 56 halaman

Naskah : Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting : Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kover : Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Ilustrasi Kover : Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penerbit : ©Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

Sumber Ilustrasi : *www.freepik.com*

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Rahmad Iswanto, SST., M.Si

Penanggung Jawab:

Kurniawan Dwi Nugroho, SST

Editor:

Kurniawan Dwi Nugroho, SST

Penulis:

Aditya Etika Sari, SST

Penyusun Tabel:


Aditya Etika Sari, SST

Layout dan Infografis:

Aditya Etika Sari, SST

<https://wonogirikab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR



Publikasi Analisis Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri 2022 terdiri berbagai data dan informasi terpilih seputar Indeks Pembangunan Manusi (IPM) Kabupaten Wonogiri. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Angka IPM disajikan secara periodik setiap tahun pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Penyajian angka IPM secara periodik menurut wilayah memungkinkan setiap wilayah mengetahui peta pembangunan manusia di daerahnya, baik pencapaian, kecepatan, posisi maupun disparitas antardaerah.

Semoga publikasi ini dapat memberikan gambaran terkait dengan pembangunan manusia di Kabupaten Wonogiri, serta bisa digunakan sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan manusia di Kabupaten Wonogiri pada masa mendatang.

Desember 2023
Kepala BPS Kabupaten Wonogiri



Rahmad Iswanto, SST., M.Si

<https://wonogirikab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel dan Gambar	ix
Daftar Lampiran	xi
Ringkasan Eksekutif	xiii
Bab 1	Pendahuluan 1
Bab 2	Metodologi Indeks Pembangunan Manusia 5
	1. Perubahan Metodologi IPM 7
	2. Implementasi IPM Metode Baru 11
Bab 3	Perkembangan Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri 15
	1. Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri..... 17
	2. Status Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri 21
Bab 4	Perkembangan Kapabilitas Dasar Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri 27
	1. Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan..... 29
	2. Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan..... 36
	3. Capaian dan Tantangan Bidang Wkonomi..... 39
Bab 5	Kesimpulan 41
Daftar Pustaka	45
Lampiran	49

<https://wonogirikab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 2.1	Tahap Perubahan Metodologi Penghitungan IPM oleh UNDP Peta Kabupaten Wonogiri	8
Tabel 2.1	Simulasi Rata-rata Aritmatik dan Rata-rata Geometrik.....	10
Gambar 2.2	Perbedaan IPM Metode Lama vs Metode Baru	12
Gambar 3.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri dan Provinsi Jawa Tengah, 2013-2022	17
Gambar 3.2	Nilai IPM Kabupaten Wonogiri dan se eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2022....	18
Gambar 3.3	Umur Harapan Hidup Kabupaten Wonogiri dan se eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2022	19
Gambar 3.4	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wonogiri dan se eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2022 (Tahun).....	19
Gambar 3.5	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Wonogiri dan se eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2022 (Tahun).....	20
Gambar 3.6	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Wonogiri dan se eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2022 (Ribu Rupiah).....	21
Gambar 3.7	Tren dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri, 2013-2022	22
Gambar 3.8	Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Wonogiri, 2013-2022 (Tahun).....	23
Gambar 3.9	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wonogiri, 2013 – 2022 (Tahun)	24
Gambar 3.10	Penduduk Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Wonogiri, 2013–2022 (ribu rupiah)	25
Gambar 4.1	Persentase Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Penduduk di Kabupaten Wonogiri, 2018-2022	31
Gambar 4.2	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih di Kabupaten Wonogiri, 2019-2022 (persen)	32
Gambar 4.3	Persentase Anak Umur 0-23 Bulan yang Pernah Diberi ASI Eksklusif Di Kabupaten Wonogiri, 2019-2022 (persen)	34
Gambar 4.4	Proporsi Persalinan Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Kabupaten Wonogiri, 2018 – 2022	35

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 4.5	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas menurut Ijasah/STTB Tertinggi yang dimiliki di Kabupaten Wonogiri, 2022 (persen)	37
Gambar 4.6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Wonogiri, 2013 – 2022 (persen) Produksi Padi tahun 2020-2021 (Ton)	38
Gambar 4.7	Tingkat Pengangguran, Persentase Penduduk Miskin dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri, 2018 – 2022	40

<https://wonogirikab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota, 2022	51
Lampiran 2	Tren Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2018-2022	52
Lampiran 3	Tren Komponen Umur Harapan Hidup (UHH) di Jawa Tengah 2018-2022	53
Lampiran 4	Tren Komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) di Jawa Tengah 2018-2022	54
Lampiran 5	Tren Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Jawa Tengah 2018-2022	55
Lampiran 6	Harapan Tren Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan di Jawa Tengah 2018-2022 (Ribu Rupiah)	56

<https://wonogirikab.bps.go.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah lama hidup, tingkat pendidikan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah tahun 2022 telah mencapai 72,79. Dengan capaian IPM itu, Jawa Tengah berada pada posisi status pembangunan manusia kategori 'tinggi'. Capaian tersebut mengantarkan Jawa Tengah pada posisi 13 dari 34 provinsi dalam pencapaian pembangunan manusia di Indonesia. Selama kurun waktu 2013 hingga 2022 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa IPM Jawa Tengah setiap tahunnya terus tumbuh 0,70 persen per tahun.

IPM Kabupaten Wonogiri pada tahun 2022 sebesar 71,04 atau tumbuh 0,78 persen atau meningkat 0,55 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya karena pada tahun 2021 pandemi Covid -19 masih melanda Indonesia yang menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, kemudian pada tahun 2022 mulai bangkit dari masa pandemic Covid-19. Di Eks Karesidenan Surakarta, IPM Kabupaten Wonogiri menempati peringkat ketujuh dari tujuh kabupaten/kota. IPM Kabupaten Wonogiri yaitu 71,04 dan telah masuk pada kategori 'tinggi'.

BAB 1 PENDAHULUAN

Laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dirilis setiap tahunnya secara global oleh United Nation Development Programme (UNDP).

Konsep yang digunakan masih sama dengan mempertimbangkan tiga aspek yaitu usia, pendidikan dan ekonomi. Hanya saja pendekatan kalkulasinya saja yang berbeda.



<https://wonogirikab.bps.go.id>

BAB 1 Pendahuluan

Perdebatan tentang indikator pembangunan sosial ekonomi telah terjadi sejak lama. Pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan telah digugat oleh berbagai kalangan yang melihat ketidakakuratan indikator tersebut, yang kemudian memunculkan indikator baru yang berfokus pada pembangunan manusia.

Laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dirilis setiap tahunnya secara global oleh United Nation Development Programme (UNDP). Konsep yang digunakan masih sama dengan mempertimbangkan tiga aspek yaitu usia, pendidikan dan ekonomi. Hanya saja pendekatan kalkulasinya saja yang berbeda. Laporan Pembangunan Manusia terbaru, “Waktu yang Penuh Ketidakpastian, Kehidupan yang Bergejolak: Membentuk Masa Depan Kita di Dunia yang Berubah” (*“Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World”*), yang diluncurkan oleh UNDP, berpendapat bahwa berbagai lapisan ketidakpastian semakin bertumpuk dan berinteraksi untuk menimbulkan gejolak pada kehidupan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua tahun terakhir berdampak luar biasa bagi miliaran orang di seluruh dunia, ketika krisis seperti COVID-19 dan perang di Ukraina terjadi secara beruntun, dan berinteraksi dengan pergeseran sosial dan ekonomi yang luas, perubahan iklim, dan peningkatan polarisasi secara besar-besaran.

Untuk pertama kalinya dalam 32 tahun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengukur kesehatan, pendidikan, dan standar hidup suatu negara, telah menurun secara global selama dua tahun berturut-turut. Pembangunan manusia telah jatuh kembali ke tingkat tahun 2016, menyebabkan kemunduran sebagian besar kemajuan menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kemunduran ini hampir sama rata karena lebih dari 90 persen negara mencatat penurunan skor IPM mereka pada 2020 atau 2021 dan lebih dari 40 mengalami penurunan di kedua tahun tersebut, menandakan bahwa krisis menjadi semakin parah di banyak negara.

Sementara itu, nilai IPM Indonesia tahun 2021 adalah 0,705 yang menempatkan Indonesia pada kategori pembangunan manusia yang tinggi, menempatkannya pada peringkat 114 dari 191 negara dan wilayah. Tahun sebelumnya, nilai IPM Indonesia adalah 0,709, sehingga ada penurunan yang sedikit sebesar 0.004. Indonesia berhasil masuk dalam kategori negara pembangunan manusia yang tinggi untuk tiga tahun berturut-turut. Kemajuan IPM Indonesia dari tahun 1990 hingga sekarang sebesar 34 persen (mnctrijaya.com)

Tinggi rendahnya nilai pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh komponen-komponen penyusun IPM tetapi juga dipengaruhi oleh indikator-indikator lain, seperti jumlah tenaga dan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta kemudahan untuk mengaksesnya, kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan, pengetahuan tentang kesehatan, distribusi pendapatan, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, publikasi ini juga menampilkan indikator lain yang turut mempengaruhi IPM.

Secara umum publikasi ini menyajikan data dan analisis IPM Kabupaten Wonogiri selama tahun 2013-2022. Data IPM secara series dapat dilihat pada tabel lampiran. Pada publikasi ini juga akan dianalisis mengenai capaian IPM dan IPG Kabupaten Wonogiri dan disparitasnya pada level kabupaten/kota. Secara khusus, publikasi ini berisi:

1. Pendahuluan,
2. Metodologi Indeks Pembangunan Manusia,
3. Perkembangan Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri,
4. Perkembangan Kapabilitas Dasar Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri,
5. Kesimpulan.

<https://wonogirikab.bps.go.id>

BAB 2

Metodologi Indeks Pembangunan Manusia

Umur Harapan
Hidup (UHH)

Rata - rata
Geometrik

- Harapan Lama
Sekolah (HLS)
- Rata - rata Lama
Sekolah (RLS)
25th+

Pengeluaran per
Kapita disesuaikan
96 Komoditas PPP

Status :

IPM < 60	: IPM Rendah
60 < IPM < 70	: IPM Sedang
70 < IPM < 80	: IPM Tinggi
IPM > 80	: IPM Sangat Tinggi

BAB 2 Metodologi Indeks Pembangunan Manusia

2.1 Perubahan Metodologi IPM

Sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP, IPM terus mendapat banyak sorotan. Sebagian pihak berpendapat bahwa indikator yang tercakup dalam IPM kurang mewakili pembangunan. Para pakar terus bekerja untuk mendalami lebih jauh tentang pembangunan manusia serta melakukan kajian dalam rangka penyempurnaan penghitungan IPM. Hal itu terutama dilakukan pada indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM. Sampai saat ini UNDP telah dua kali melakukan penyempurnaan pada tahun 1991 dan 1995 dan melakukan perubahan pada tahun 2010.

Awalnya UNDP memperkenalkan suatu indeks komposit yang mampu mengukur pembangunan manusia. Ketika diperkenalkan pada tahun 1990, mereka menyebutnya sebagai Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index* -HDI) yang kemudian secara rutin dipublikasikan setiap tahun dalam Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*). Kala itu, IPM dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diproksi dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan yang diproksi dengan angka melek huruf dewasa, serta dimensi standar hidup layak yang diproksi dengan PDB per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik.

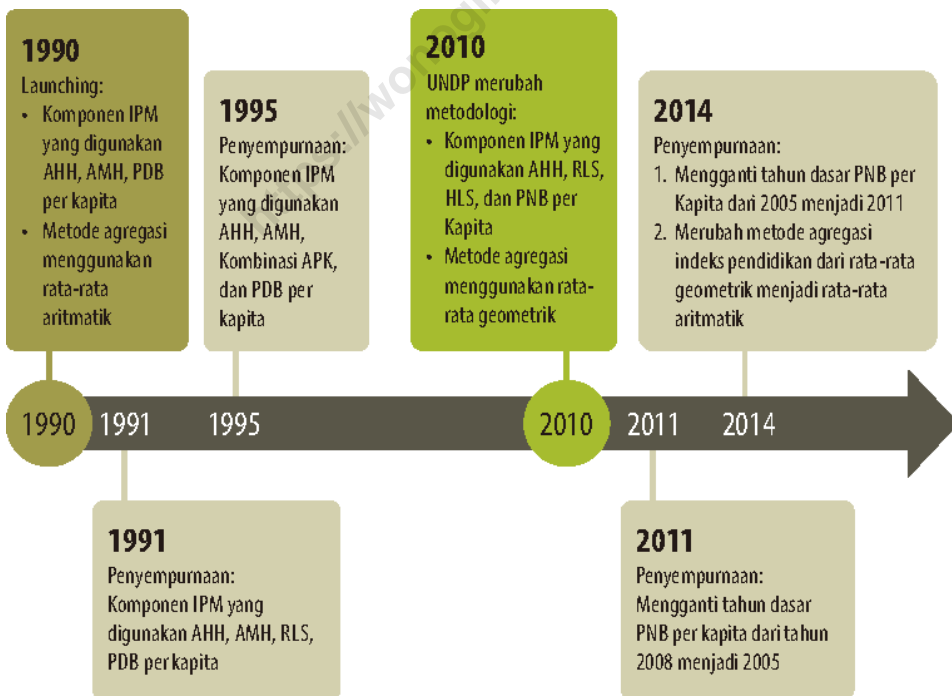
Setahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Akhirnya, terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Karena terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan, UNDP memberi bobot untuk keduanya. Indikator angka melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Hingga tahun 1994, keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM masih cukup relevan. Namun akhirnya, pada tahun 1995 UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM. Kali ini, UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama dengan sebelumnya.

Pada tahun 2010, UNDP melakukan perubahan drastis pada metodologi penghitungan

IPM. Dalam metode baru ini, beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator Angka Partisipasi Kasar (*Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan Indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah. Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit.

Perubahan yang dilakukan UNDP tidak hanya sebatas itu. Setahun kemudian, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP mengubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2005 menjadi 2011. Tiga tahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Kali ini, UNDP mengubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

Gambar 2.1 Tahap Perubahan Metodologi Penghitungan IPM oleh UNDP



Keterangan:

AHH	: Angka Harapan Hidup saat lahir	APK	: Angka Partisipasi Kasar
AMH	: Angka Melek Huruf	HLS	: Harapan Lama Sekolah
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah	PNB	: Produk Nasional Bruto
PDB	: Produk Domestik Bruto		

Perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan yang cukup rasional. Suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Pemilihan metode dan variabel yang tepat akan menghasilkan indeks yang cukup relevan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Namun sebenarnya alasan utama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM adalah sebagai berikut:

Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur kualitas pendidikan karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar wilayah dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang tidak sensitif akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, indikator AMH dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan IPM.

Selanjutnya adalah indikator PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun disadari bahwa PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi, termasuk juga investasi dari asing. Padahal, tidak seluruh pendapatan faktor produksi dinikmati penduduk lokal. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat atau bahkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Pada dasarnya, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan pembangunan. Rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah. Perumpamaan sederhana untuk dapat melihat kelemahan rata-rata aritmatik misalnya dengan menghitung secara sederhana nilai ketiga dimensi pembangunan manusia.

Tabel 2.1 Simulasi Rata-rata Aritmatik dan Rata-rata Geometrik

Kesehatan	Pendidikan	Standar Hidup Layak	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik
3	3	3	3,00	3,00
2	3	4	3,00	2,88
1	3	5	3,00	2,47

Misal, capaian dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup masing-masing adalah 3, 3 dan 3. Dengan rata-rata aritmatik diperoleh bahwa rata-rata ketiga dimensi adalah $(3+3+3) / 3 = 3$. Pada contoh kasus lain, misalkan capaian ketiga dimensi berturut-turut adalah 2, 3 dan 4, maka rata-rata ketiga dimensi juga masih 3, yaitu $(2+3+4) / 3 = 3$. Pada kasus yang lebih ekstrim, rata-rata aritmatik mampu menutupi ketimpangan pembangunan yang terjadi di suatu wilayah. Misal capaian ketiga dimensi berturut-turut menjadi 1, 3 dan 5, maka dalam kondisi yang ekstrim ini rata-rata pembangunan manusia akan tetap 3. Sehingga dalam 3 macam kondisi yang berbeda-beda jika menggunakan rata-rata aritmatika akan menghasilkan indeks komposit yang sama. Rata-rata aritmatika menyebabkan seolah-olah tidak terjadi ketimpangan karena hasilnya dapat ditutupi oleh dimensi lain yang lebih tinggi capaiannya. Kelemahan rata-rata aritmatik ini menjadi salah satu alasan mendasar untuk memperbaiki metode penghitungan IPM.

Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak negara sudah sangat tinggi. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita.

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks, yaitu menghitung agregasi indeks dengan menggunakan rata-rata geometrik (*geometric mean*). Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan ketiga dimensi IPM agar capaian IPM menjadi optimal. Perubahan mendasar yang terjadi pada penghitungan IPM tentunya membawa dampak. Secara langsung, ada dua dampak yang terjadi akibat perubahan metode penghitungan IPM.

Pertama, perubahan level IPM. Secara umum, level IPM metode baru lebih rendah dibanding IPM metode lama. Hal ini terjadi karena perubahan indikator dan perubahan cara penghitungan. Penggantian indikator Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS) membuat angka IPM lebih rendah karena secara umum AMH sudah di atas 90 persen sementara HLS belum cukup optimal. Selain itu, perubahan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik juga turut andil dalam penurunan level IPM metode baru. Ketimpangan yang terjadi antar dimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah.

Kedua, terjadi perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator dan cara penghitungan membawa dampak pada perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator berdampak pada perubahan indeks dimensi. Sementara perubahan cara penghitungan berdampak signifikan terhadap agregasi indeks. Namun, perlu dicatat bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan karena kedua metode tidak sama.

2.2 Implementasi IPM Metode Baru

Setelah mempelajari secara mendalam tentang kelemahan pada penghitungan IPM metode lama, Indonesia perlu memperbaiki penghitungan untuk menjawab tantangan masyarakat internasional. Pada tahun 2014, Badan Pusat Statistik secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru dengan sumber data yang tersedia di Indonesia, yaitu:

- a. Umur harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk)
- b. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)
- c. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Gambar 2.2. Perbedaan IPM Metode Lama vs Metode Baru

Metode Lama	Metode Baru
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Angka Melek Huruf (AMH) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 15 th +	Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 25 th +
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan: 27 Komoditas PPP	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan: 96 Komoditas PPP
Rata-rata Hitung	Rata-rata Geometrik
Reduksi <i>Shortfall</i> (RSF)	Pertumbuhan Aritmatik

Badan Pusat Statistik melakukan beberapa penyesuaian dalam metode baru penghitungan IPM. Salah satunya adalah dengan melakukan proksi terhadap PNB per kapita dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Hal ini terkait dengan ketersediaan data yang ada. Pada dasarnya, indikator PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita, akan tetapi data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Meskipun pengeluaran per kapita tetap digunakan, ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli yang digunakan. Pada metode lama terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli, sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Hal ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui.

Indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) tidak mengalami perubahan pada metode baru ini, akan tetapi sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Indikator ini menjadi penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan karena relevansinya serta ketersediaannya hingga tingkat kabupaten/kota.

Indikator Angka Melek Huruf (AMH) diganti dengan indikator baru, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Indikator AMH sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini dimana semua daerah memiliki AMH lebih dari 90 persen. Sedangkan untuk indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tetap dipertahankan karena masih relevan dalam menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Hanya saja cakupannya diganti, dimana pada metode lama cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas, sementara pada metode baru cakupan yang dihitung adalah penduduk usia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan utama lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 tahun proses pendidikan telah selesai. Sehingga bisa dikatakan bahwa penduduk 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan rata-rata aritmatik. Sementara pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik. Metode agregasi pada metode baru merupakan penyempurnaan dari metode lama karena rata-rata geometrik memiliki keunggulan dalam mendeteksi ketimpangan dibanding rata-rata aritmatik.

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan reduksi *shortfall*, sedangkan pada metode baru diukur dengan menggunakan pertumbuhan aritmatik. Reduksi *Shortfall* secara sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM=100). Sedangkan pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya.

BAB 3

Perkembangan Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri

76,41
TAHUN

Umur Harapan
Hidup (UHH)

12,51
TAHUN

Harapan Lama
Sekolah (HLS)

7,42
TAHUN

Rata - rata Lama
Sekolah (RLS)

9.780
Ribu
Rupiah

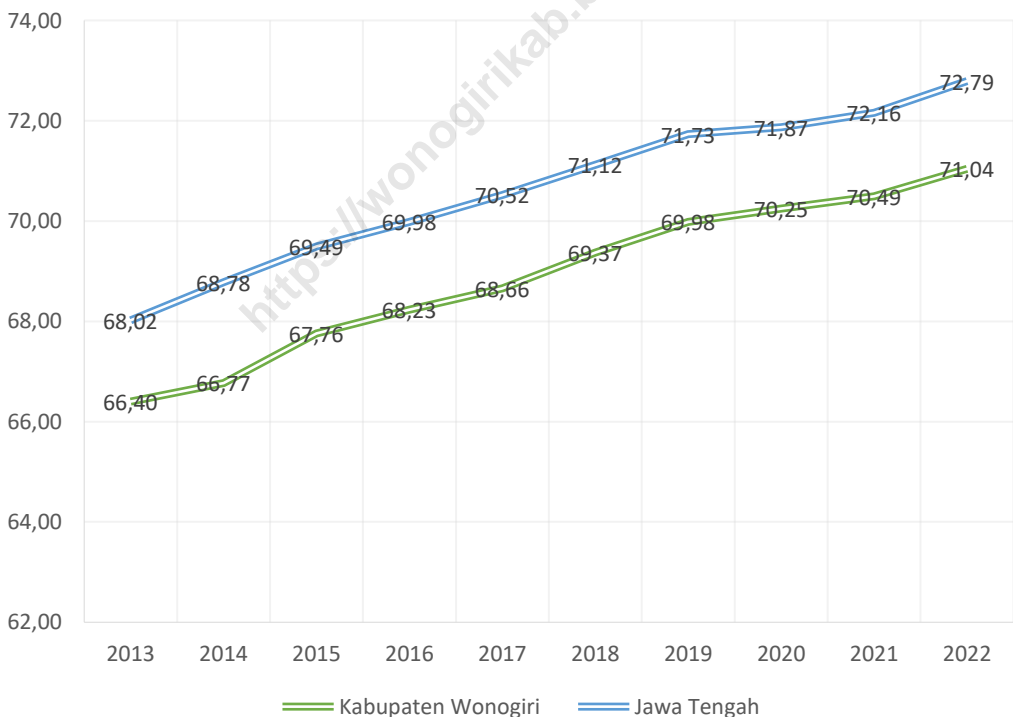
Pengeluaran perkapita
disesuaikan (PPP)

BAB 3 Perkembangan Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri

3.1 Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri

Pembangunan manusia telah memberikan pemahaman baru terhadap sudut pandang pembangunan yang lebih luas. Selama kurun waktu 2013 hingga 2022 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa IPM Kabupaten Wonogiri setiap tahunnya terus tumbuh 0,70 persen per tahun. Meskipun capaian IPM Kabupaten Wonogiri berada di bawah capaian Jawa Tengah, namun kecepatan tumbuh IPM Kabupaten Wonogiri selama sepuluh tahun terakhir sebesar 0,67 persen per tahun.

Gambar 3.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri dan Provinsi Jawa Tengah, 2013-2022



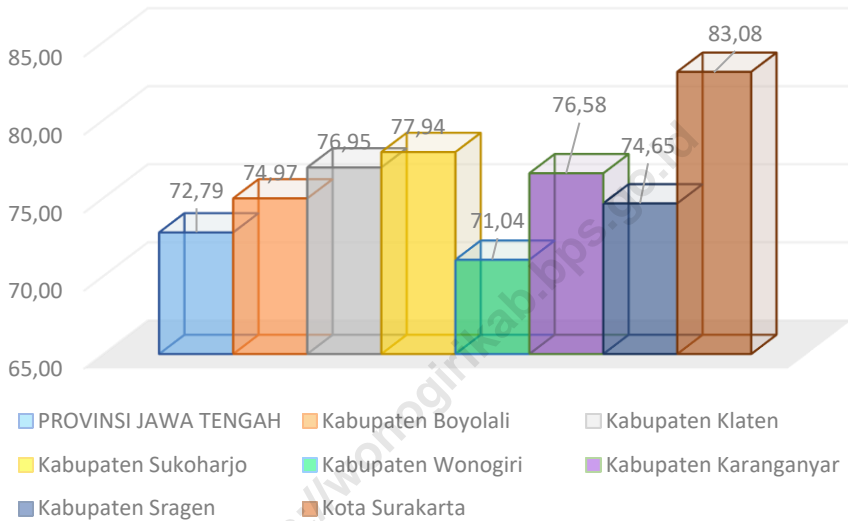
Sumber: BPS

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri tahun 2022 telah mencapai 71,04. Dengan capaian IPM itu, Kabupaten Wonogiri berada pada posisi status pembangunan manusia kategori 'tinggi'. Capaian tersebut mengantarkan Kabupaten Wonogiri pada posisi 20 dari 35

kabupaten/kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah.

Di wilayah Karesidenan Surakarta, IPM Kabupaten Wonogiri menempati posisi ketujuh. Kota Surakarta yang merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan di Indonesia memiliki capaian IPM tertinggi yaitu 83,08 dan telah masuk pada kategori 'sangat tinggi'. Sedangkan provinsi Jawa Tengah mencapai IPM sebesar 72,79 masuk pada kategori 'tinggi'. Selisih capaian IPM Kabupaten Wonogiri dengan IPM Jawa Tengah sebesar 1,75 poin.

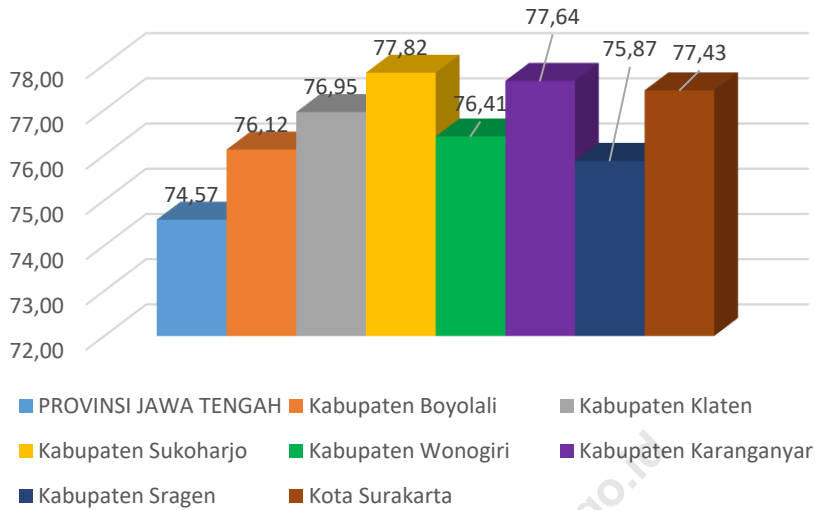
Gambar 3.2 Nilai IPM Kabupaten Wonogiri dan se eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2022



Sumber: BPS

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Kabupaten Wonogiri menempati posisi keenam yang mana diatas UHH Kabupaten Sragen. UHH Kabupaten Wonogiri lebih tinggi 1,84 tahun jika dibandingkan dengan Jawa Tengah. Hal ini menggambarkan bahwa jika bayi baru lahir di Kabupaten Wonogiri memiliki harapan hidup hingga usia 76,41 tahun. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan UHH Provinsi Jawa Tengah.

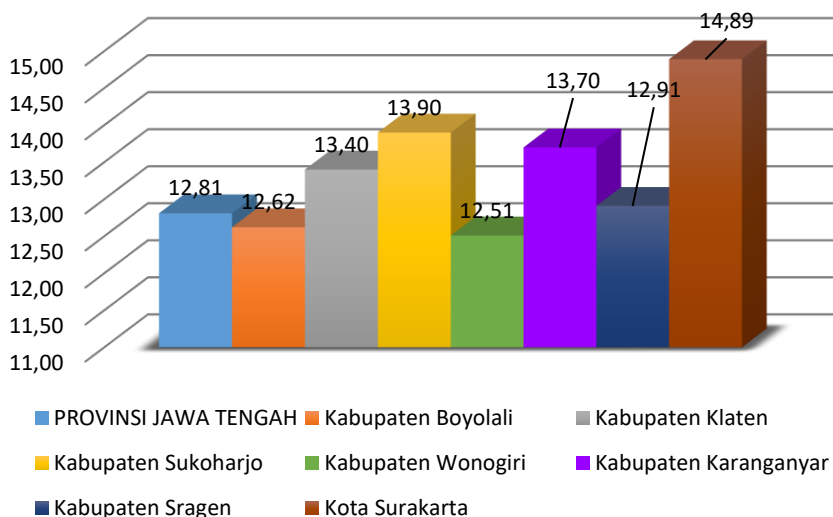
Gambar 3.3 Umur Harapan Hidup Kabupaten Wonogiri dan se eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2022



Sumber: BPS

Di bidang pendidikan, capaian komponen harapan lama sekolah paling tinggi di Kabupaten Karanganyar. Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wonogiri dan Kab/Kota di Eks Karesidenan Surakarta yaitu penduduk usia 7 tahun memiliki harapan untuk tetap bersekolah hingga menyelesaikan jenjang SMA. Sementara di Kabupaten Wonogiri penduduk usia 7 tahun memiliki harapan untuk tetap bersekolah hingga menyelesaikan jenjang SMA/ sederajat (12,51 tahun).

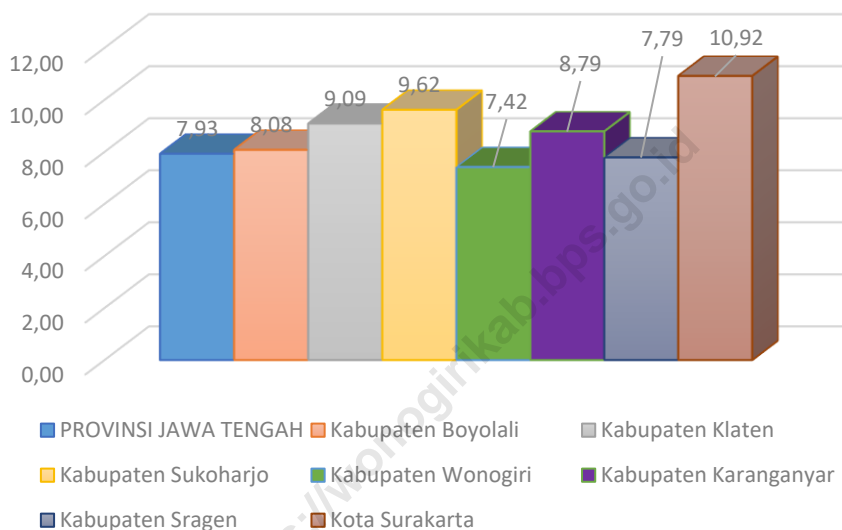
Gambar 3.4 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wonogiri dan se eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2022 (Tahun)



Sumber: BPS

Jika dilihat dari capaian pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas, maka selisih rata-rata lama sekolah antara Kabupaten Wonogiri dan Jawa Tengah mencapai 0,51 tahun. Kota Surakarta memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi di eks-Karesidenan Surakarta yaitu selama 10,92 tahun, sedangkan Kabupaten Wonogiri memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 7,42 tahun.

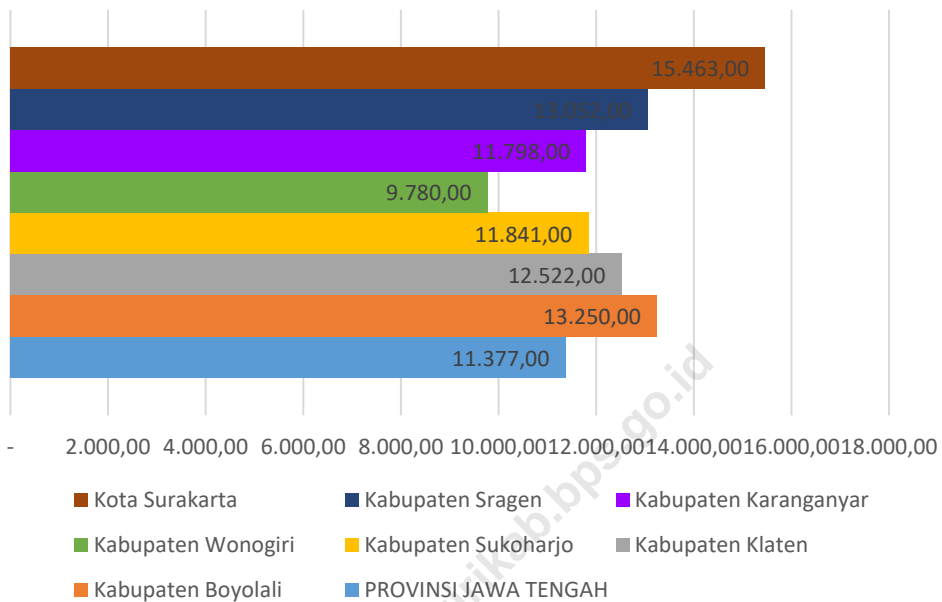
Gambar 3.5 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Wonogiri dan se eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2022 (Tahun)



Sumber: BPS

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) di Kabupaten Wonogiri mencapai Rp9,780 juta. Hal ini menjadi paling rendah untuk nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan dari kab/kota lain di eks-Karesidenan Surakarta. Nilai capaian Provinsi Jawa Tengah ini tercatat 1,16 kali pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) di Kabupaten Wonogiri.

Gambar 3.6 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Wonogiri dan se eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2022 (Ribu Rupiah)



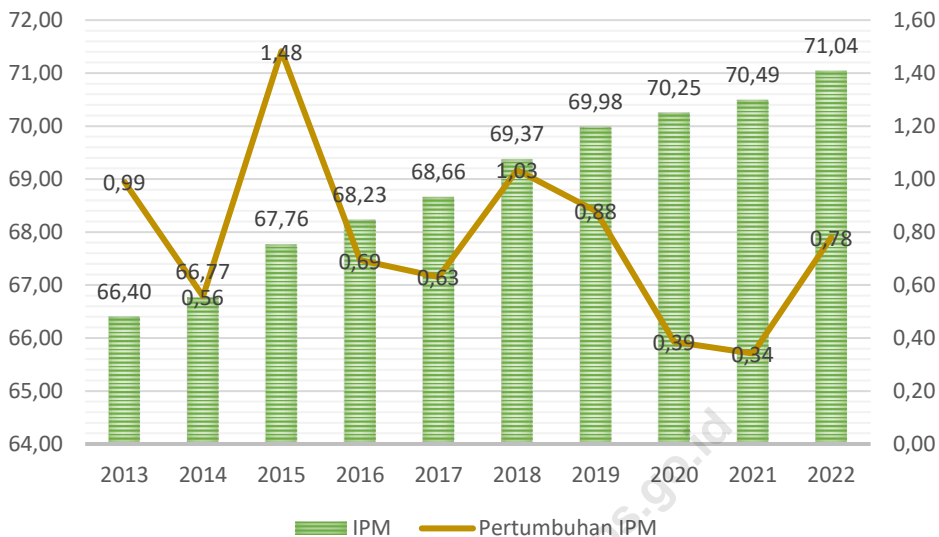
Sumber: BPS

3.2 Status Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri

Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Wonogiri terus mengalami kemajuan selama periode 2013 hingga 2022. IPM Kabupaten Wonogiri meningkat dari 66,40 pada tahun 2013 menjadi 71,04 pada tahun 2022. Selama kurun waktu satu dekade terjadi peningkatan sebesar 4,64 poin. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Wonogiri rata-rata tumbuh sebesar 0,78 persen per tahun. Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri selama satu dekade terakhir menunjukkan fluktuasi. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mengalami peningkatan 1,48 persen. Sedangkan tahun 2022 mengalami kenaikan hingga 0,78 persen.

Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia merupakan cara lain untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Perubahan status pembangunan manusia bisa dijadikan acuan dalam membaca perkembangan pembangunan manusia.

Gambar 3.7 Tren dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri, 2013-2022



Sumber: BPS

Kabupaten Wonogiri mencatat kemajuan IPM yang cukup besar yang berimbas pada peningkatan status pembangunan manusia di Kabupaten Wonogiri. Saat ini, pembangunan manusia Kabupaten Wonogiri telah berstatus “tinggi”, sementara selama periode 2013 hingga 2019 pembangunan manusia Kabupaten Wonogiri hanya berstatus “sedang”.

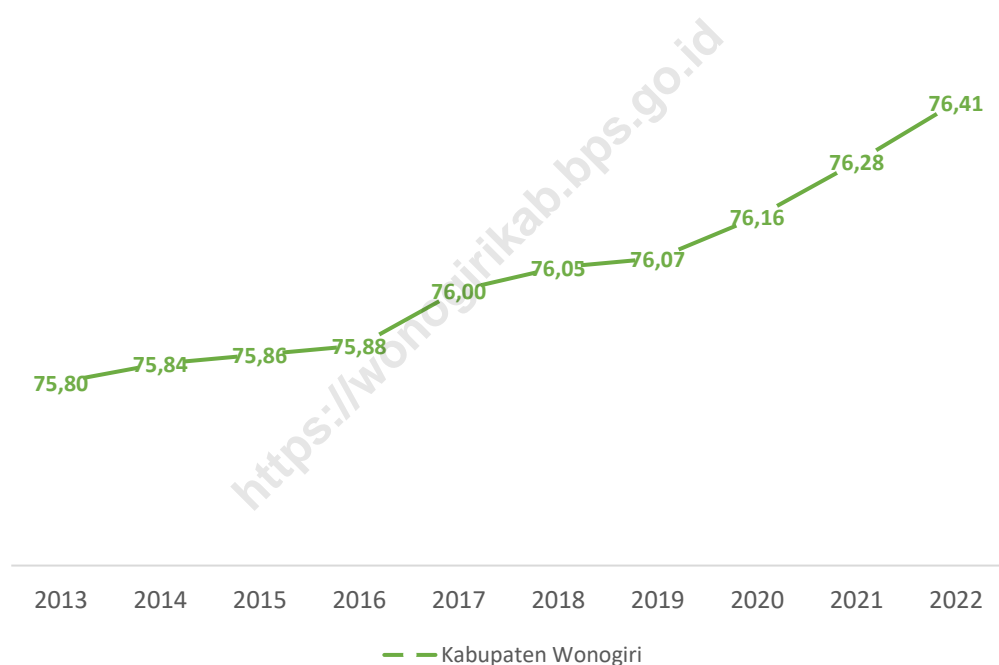
Penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi yang semakin baik turut membangun pembangunan manusia yang juga makin lebih baik. Peningkatan IPM 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Penanganan pandemi yang semakin baik tersebut ditandai dengan cakupan vaksinasi yang semakin luas, serta tingkat kematian yang semakin rendah. Selain itu pemerintah juga melonggarkan syarat kegiatan masyarakat salah satunya melalui SKB Menteri terkait sekolah tatap muka pada Mei 2022.

Sedangkan pemulihan ekonomi terus berlanjut ditandai dengan, tren pertumbuhan tahunan meningkat, keadaan ketenagakerjaan yang semakin membaik, pengangguran menurun, penduduk usia kerja yang terdampak pandemi berkurang secara signifikan.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan.

Tren umur harapan hidup saat lahir dari tahun 2013 – 2022 menunjukkan capaian yang bagus. Pada tahun 2013, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Wonogiri hanya sebesar 75,80 tahun, sedangkan pada tahun 2022 rata-rata bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 76,41 tahun. Terus meningkatnya nilai UHH Kabupaten Wonogiri setiap tahun dari tahun 2013 hingga 2023 menunjukkan indikasi perbaikan pembangunan bidang kesehatan. Pada tahun 2022 UHH meningkat 0,17 persen yang mana paling tinggi pertumbuhannya dalam satu dekade.

Gambar 3.8 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Wonogiri, 2013-2022 (Tahun)

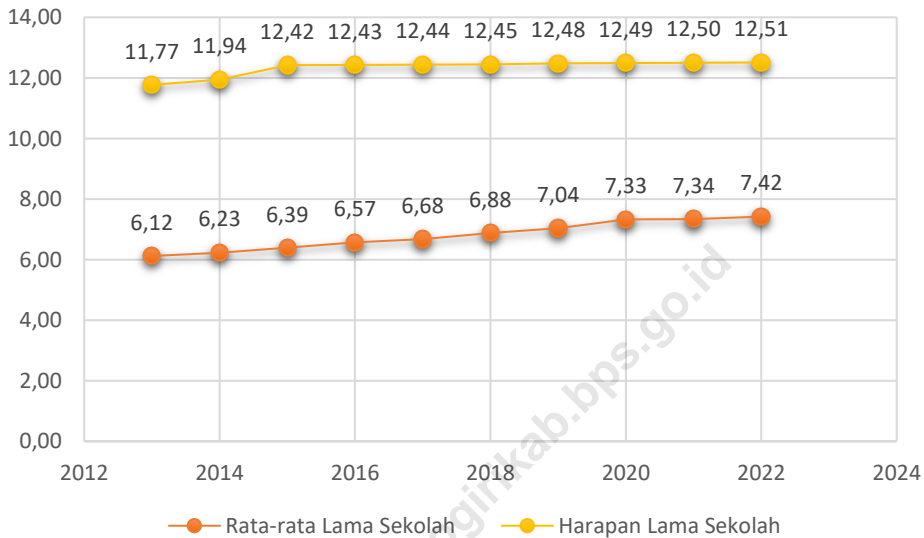


Sumber: BPS

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS Kabupaten Wonogiri sebesar 7,42 tahun sehingga bisa dikatakan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Wonogiri yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,42 tahun atau dengan kata lain telah mampu mengenyam pendidikan sampai kelas VII (putus sekolah di kelas VIII). Kabupaten Wonogiri mengalami kenaikan rata – rata lama sekolah sebesar 1,09 persen di tahun 2022. Meskipun pencapaian tersebut masih harus ditingkatkan, namun di sisi lain angka HLS Kabupaten Wonogiri memberikan harapan yang lebih cerah, yaitu mencapai sebesar 12,51 yang memiliki arti bahwa secara rata-rata anak

berusia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan pada tahun 2022 diharapkan mampu bersekolah hingga 12,51 tahun atau visa sampai Diploma I. Kabupaten Wonogiri mengalami kenaikan harapan lama sekolah sebesar 0,08 persen di tahun 2022.

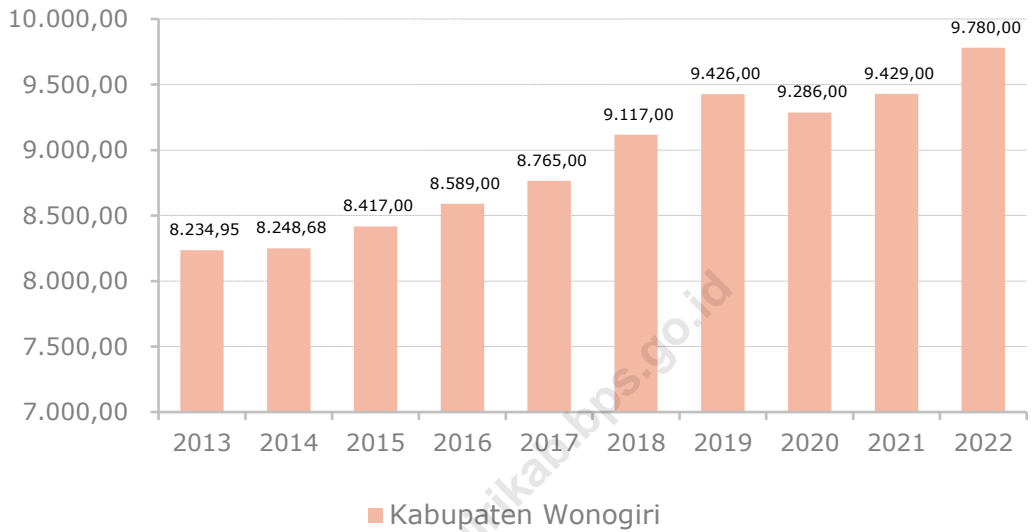
Gambar 3.9 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wonogiri, 2013 – 2022 (Tahun)



Sumber: BPS

Pengeluaran penduduk bisa menjadi gambaran tingkat keamanan seseorang. Uang memiliki arti yang penting untuk memperluas pilihan, terutama bagi penduduk miskin. Oleh karena itu, perkembangan tingkat pengeluaran menjadi hal menarik untuk diteliti. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Wonogiri tahun 2022 telah mencapai Rp 9,780 juta per tahun. Pengeluaran per kapita Kabupaten Wonogiri terus meningkat dari tahun 2013 hingga 2019. Selama kurun waktu tersebut, perkembangan pada tahun 2020 cenderung melambat dibanding perkembangan pada kurun waktu yang lain. Terjadinya pandemi covid-19 menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga pada tahun 2020 pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami penurunan sebesar 1,49 persen. Hal ini menjelaskan bahwa krisis global dan terjadinya pandemi memberikan dampak pada perekonomian di Kabupaten Wonogiri, karena di antara semua komponen IPM, komponen pengeluaran per kapita paling rentan terkena dampak krisis moneter. Semakin pulihnya perekonomian di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2022, mengakibatkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan penduduk Kabupaten Wonogiri kembali meningkat sebesar 3,72 persen.

Gambar 3.10 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Wonogiri, 2013–2022 (ribu rupiah)



Sumber: BPS

BAB 4

Perkembangan Kapabilitas Dasar Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri

1. Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan

Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH)	76,41 tahun
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih	77,85 persen
Bayi Umur 0 - 23 bulan yang pernah diberi ASI eksklusif	93,52 persen
Proporsi Persalinan Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Tenaga Medis	100,00 persen

2. Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan

Rata - rata Lama Sekolah	7,42 tahun
Harapan Lama Sekolah	12,51 tahun
APS 7 - 12 tahun	99,31 persen
APS 13 - 15 tahun	95,32 persen
APS 16 - 18 tahun	80,94 persen

3. Capaian dan Tantangan Bidang Ekonomi

Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	9,78 juta rupiah
Persentase Penduduk Miskin	10,99 persen
Tingkat Pengangguran Terbuka	1,95 persen
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,63 persen

BAB 4 Perkembangan Kapabilitas Dasar Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya sehingga tujuan utama pembangunan manusia adalah untuk memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Hal ini dapat terwujud apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Hal tersebut sekaligus merupakan tujuan utama dari pembangunan yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset kekayaan bangsa sekaligus sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama yang harus dimiliki manusia agar mampu meningkatkan potensinya dan berkontribusi dalam pembangunan. Pada umumnya, semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Pembangunan manusia yang masih terus berlangsung hingga saat ini mencatat perkembangan yang menggembirakan. Selain itu, masih terdapat persoalan dasar yang harus diselesaikan pada masa mendatang.

4.1 Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan

Capaian IPM Kabupaten Wonogiri merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Salah satu komponen dalam penentuan kualitas hidup manusia adalah kesehatan. Kualitas hidup manusia sangat tergantung dari derajat kesehatannya. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setiap orang (BPS, 2016). Hal ini dilakukan sebagai investasi bagi pembangunan manusia yang produktif secara sosial ekonomi.

Keberhasilan dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang tinggi.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang karena memberi kesempatan lebih panjang untuk menikmati kehidupan. Untuk dapat berumur panjang diperlukan kesehatan yang lebih baik. Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator umur harapan hidup saat lahir (e0). Indikator ini menjadi salah satu indikator gambaran derajat kesehatan masyarakat.

Selama kurun waktu 2018 hingga 2022, umur harapan hidup Kabupaten Wonogiri terus meningkat dari 76,05 tahun pada tahun 2018 menjadi 76,41 pada tahun 2022. Terus meningkatnya UHH menunjukkan bahwa derajat kesehatan di Kabupaten Wonogiri semakin membaik. Hal itu tentunya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Terdapat ungkapan bijak yang menyatakan bahwa “kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala yang kita miliki tidak berarti apa-apa”. Maka diperlukan kepedulian tinggi dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa peduli pada peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Wonogiri. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Terus meningkatnya nilai UHH Kabupaten Wonogiri hingga tahun 2022 menunjukkan indikasi perbaikan pembangunan bidang kesehatan.

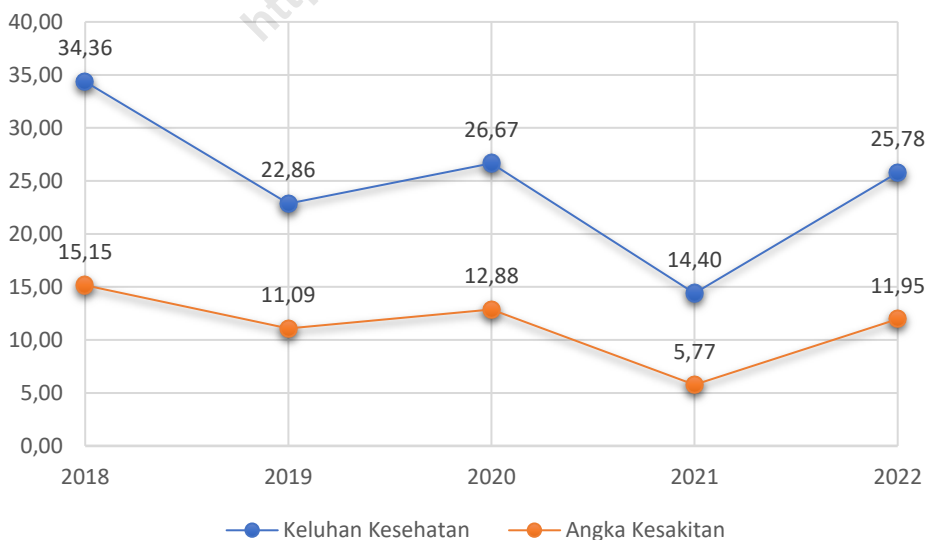
Kesehatan merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap orang. Namun, kesehatan seringkali menjadi hilir (dampak) dari berbagai permasalahan yang dialami individu dan lingkungan sekitarnya. Padahal, kesehatan merupakan modal awal bagi perkembangan potensi individu dalam hidup. Teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu: 1) gaya hidup (life style); 2) lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya); 3) pelayanan kesehatan; dan 4) faktor genetik (keturunan). Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang.

Secara umum, peningkatan usia harapan hidup penduduk pada saat lahir di suatu wilayah menggambarkan kualitas kesehatan penduduk yang semakin membaik. Keberhasilan dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat, memiliki derajat kesehatan yang tinggi, kesadaran yang tinggi, kemauan yang keras dan kemampuan hidup sehat.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah adalah banyaknya keluhan kesehatan penduduk. Keluhan kesehatan menunjukkan gejala penyakit atau kondisi tubuh yang tidak sehat. Data mengenai keluhan kesehatan dapat digunakan oleh pemerintah dalam menentukan program-program kesehatan. Hasil Susenas 2022 menunjukkan bahwa persentase penduduk Kabupaten Wonogiri yang mempunyai keluhan kesehatan sebanyak 25,78 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekitar 2 dari 10 orang di Kabupaten Wonogiri mempunyai keluhan kesehatan.

Sementara itu morbiditas adalah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Semakin tinggi morbiditas menunjukkan rendahnya tingkat kesehatan penduduk. Artinya semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Hal ini menunjukkan masyarakat rentan terhadap berbagai macam penyakit yang timbul akibat lemahnya daya resistensinya. Kondisi kesehatan yang buruk akan berdampak pada usia harapan hidup dan tingkat mortalitas. Berdasarkan data Susenas tahun, persentase penduduk di Kabupaten Wonogiri yang menderita sakit mencapai 11,95 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2022.

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Penduduk di Kabupaten Wonogiri, 2018-2022

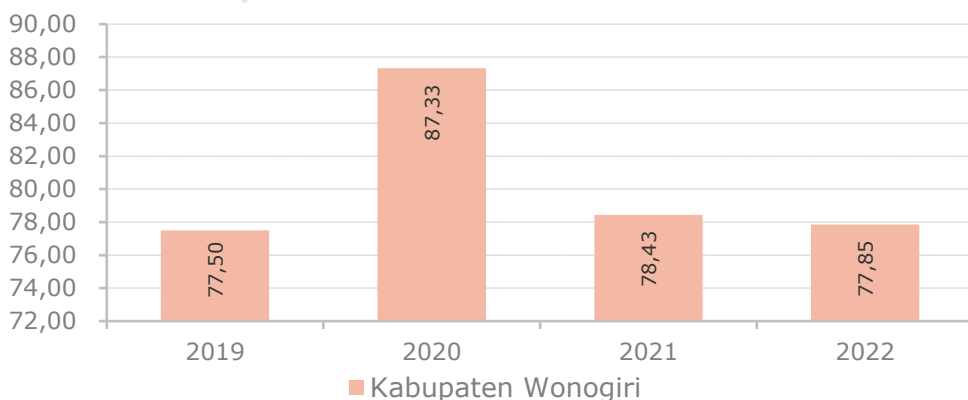


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS

Indikator lain yang mencerminkan tingkat kesehatan adalah fasilitas perumahan. Salah satu dari sekian banyak fasilitas perumahan yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Menurut data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2022, masih tercatat sebesar 5,42 persen rumah tangga di Kabupaten Wonogiri yang tidak memiliki jamban sendiri. Kemudian, sebanyak 22,15 persen rumah tangga belum menggunakan sumber air minum bersih, serta 4,09 persen jenis lantai rumahnya masih tanah. Tentu hal ini perlu mendapat perhatian yang besar karena jika masih banyak rumah tangga yang tinggal di lingkungan yang kurang sehat maka harapan untuk mencapai kondisi penduduk Kabupaten Wonogiri dengan derajat kesehatan yang baik mungkin akan sulit tercapai. Sebagai dampaknya pada kualitas pembangunan manusia adalah lambatnya peningkatan komponen kesehatan.

Gambar 4.2 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih di Kabupaten Wonogiri, 2019-2022 (persen)



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS

Periode 1.000 hari pertama kehidupan anak, mulai dari saat di dalam kandungan ibu sampai pada usia dua tahun merupakan periode emas, atau disebut *window of opportunity* perkembangan anak. Pada periode tersebut, otak anak tumbuh lebih cepat dibandingkan

periode lainnya selama siklus hidup (Thompson & Nelson, 2001). Sehingga intervensi yang diberikan pada periode tersebut dapat sangat memengaruhi perkembangan seorang anak dan akan berpengaruh selama kehidupannya.

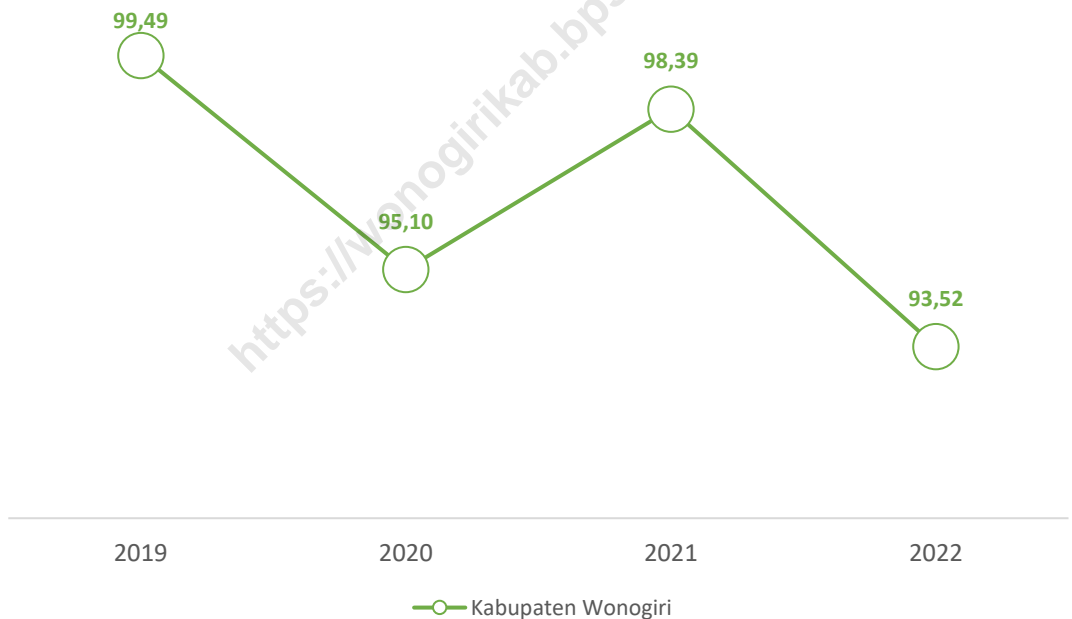
Nutrisi yang diperoleh oleh anak pada awal masa pertumbuhannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. UNICEF (2016) menyebutkan jika apa dan bagaimana makanan diberikan ke anak pada dua tahun awal kehidupannya sangat krusial berpengaruh terhadap kesehatan, perkembangan, dan ketahanan hidup anak. Pemberian ASI merupakan salah satu investasi terbaik untuk mencukupi kebutuhan nutrisi serta mengoptimalkan kelangsungan hidup anak pada dua tahun pertama. Berbagai penelitian telah membuktikan pengaruh ASI. Anak yang diberi ASI dengan durasi panjang cenderung memiliki tingkat kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak disusui atau disusui dengan durasi yang singkat. Pemberian ASI juga berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan dan memberi perlindungan terhadap berbagai penyakit di masa yang akan datang, seperti overweight dan diabetes (Victora et al., 2016).

Di Indonesia, aturan mengenai pemberian ASI secara eksklusif bagi bayi telah tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu. Anjuran pemberian ASI dimulai sejak bayi lahir sampai dengan bayi berumur enam bulan, kemudian dianjurkan untuk dilanjutkan sampai anak berusia dua tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai. Persentase bayi kurang dari enam bulan yang mendapat ASI eksklusif juga merupakan salah satu indikator sasaran yang merupakan intervensi spesifik dalam upaya penurunan stunting. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting disebutkan bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting, capaian target indikator ASI eksklusif tahun 2024 adalah sebesar 80 persen.

Salah satu indikator untuk menggambarkan capaian program pemberian ASI adalah Persentase anak umur 0-5 bulan yang menerima ASI eksklusif. Indikator ini merupakan salah satu dari rekomendasi praktik menyusui dari *Global Strategy for Infant and Young Child Feeding* yang dikeluarkan oleh WHO dan UNICEF. Dengan hanya memberikan ASI sampai anak berusia enam bulan, maka bayi menerima sumber makanan yang terjamin, aman, bersih, dan sehat. Pemberian ASI eksklusif memungkinkan penyebaran bakteri baik dari ibu ke bayi yang dapat membantu melawan penyakit, membantu mencerna makanan, dan meningkatkan sistem imunitas (Gura, 2014).

Tren indikator ASI eksklusif cenderung naik turun pada periode 2019-2022. Pada tahun 2022, 93 dari 100 anak umur 0-23 bulan di Kabupaten Wonogiri pernah menerima ASI eksklusif. Walaupun tren indikator terus meningkat dalam empat tahun terakhir, capaian indikator ini masih perlu terus ditingkatkan dan diperhatikan pemerataannya. Beberapa penelitian di Indonesia menyebutkan bahwa kegagalan pemberian ASI eksklusif terkait dengan waktu pemberian yang terlalu cepat. Budaya untuk memberikan makanan tambahan pendamping ASI sebelum umur enam bulan juga masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan ASI eksklusif. Penelitian terdahulu di Indonesia mencatat jika kegagalan pemberian ASI eksklusif di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh budaya pemberian makanan sesaat setelah anak lahir (Laksono, Wulandari, Ibad, & Kusri, 2021).

Gambar 4.3 Persentase Anak Umur 0-23 Bulan yang Pernah Diberi ASI Eksklusif Di Kabupaten Wonogiri, 2019-2022 (persen)

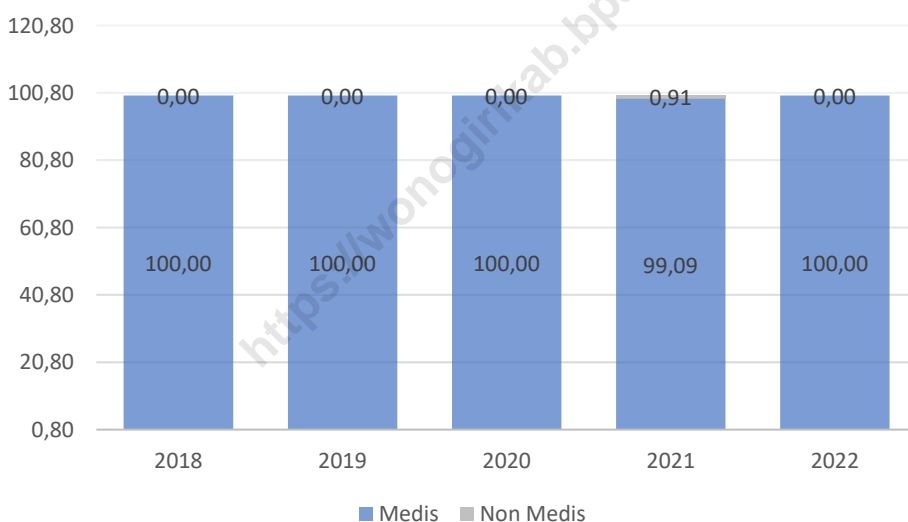


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS

Selain ASI, daya tahan tubuh balita perlu di dukung dengan pemberian imunisasi. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2022 ditemukan masih ditemui sekitar dua puluh delapan persen balita di Kabupaten Wonogiri yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap. Hal itu menyebabkan mereka mudah tertular penyakit berbahaya karena tidak adanya kekebalan terhadap penyakit tersebut.

Persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi salah satu yang penting terhadap perlindungan kelompok rentan. Menurut Kementerian Kesehatan, rendahnya persentase persalinan yang ditolong tenaga kesehatan menjadi salah satu penyebab terbesar kematian ibu akibat pendarahan dan infeksi. Pertolongan tenaga kesehatan ketika proses persalinan akan mempercepat penanganan ketika terjadi pendarahan atau infeksi, sehingga bisa mengurangi risiko kematian pada ibu. Penanganan persalinan oleh tenaga medis memiliki beberapa tujuan antara lain agar ibu hamil dan bayi dapat secara cepat dan tepat mendapatkan pelayanan pertolongan persalinan sesuai standar, mengenali secara dini tanda - tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas dan mendapatkan pertolongan pertama gawat darurat dengan cepat sebagai persiapan upaya rujukan ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi.

Gambar 4.4 Proporsi Persalinan Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Kabupaten Wonogiri, 2018 – 2022 (persen)



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS

Selama kurun waktu lima tahun terakhir persentase kelahiran balita yang ditolong oleh tenaga medis cenderung meningkat. Pada tahun 2018 sekitar 100 persen balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis. Namun pada tahun 2021 persentase ini menurun menjad 99,09 persen. Pada tahun 2022, persentase kelahiran balita yang ditolong oleh tenaga medis meningkat kembali menjadi 100 persen. Jika persentase ini bisa terus 100 persen maka kematian balita bisa semakin ditekan dan salah satu target indikator pada SDG’s yang kedua yaitu menurunkan rasio kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 tidak mustahil untuk diraih.

4.2 Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan

Untuk meningkatkan kapabilitas dasar penduduk di bidang pendidikan, ada berbagai macam upaya yang dapat dilakukan, misalnya dengan memperluas cakupan pendidikan formal. Hingga saat ini, berbagai program di bidang pendidikan telah diupayakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa diantaranya mencakup program untuk memberantas buta aksara, menekan angka putus sekolah melalui pemberian bantuan operasional sekolah atau yang lebih dikenal dengan sebutan BOS, serta menjamin kesempatan untuk memperoleh pendidikan melalui program penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Berbagai macam program pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dasar manusia.

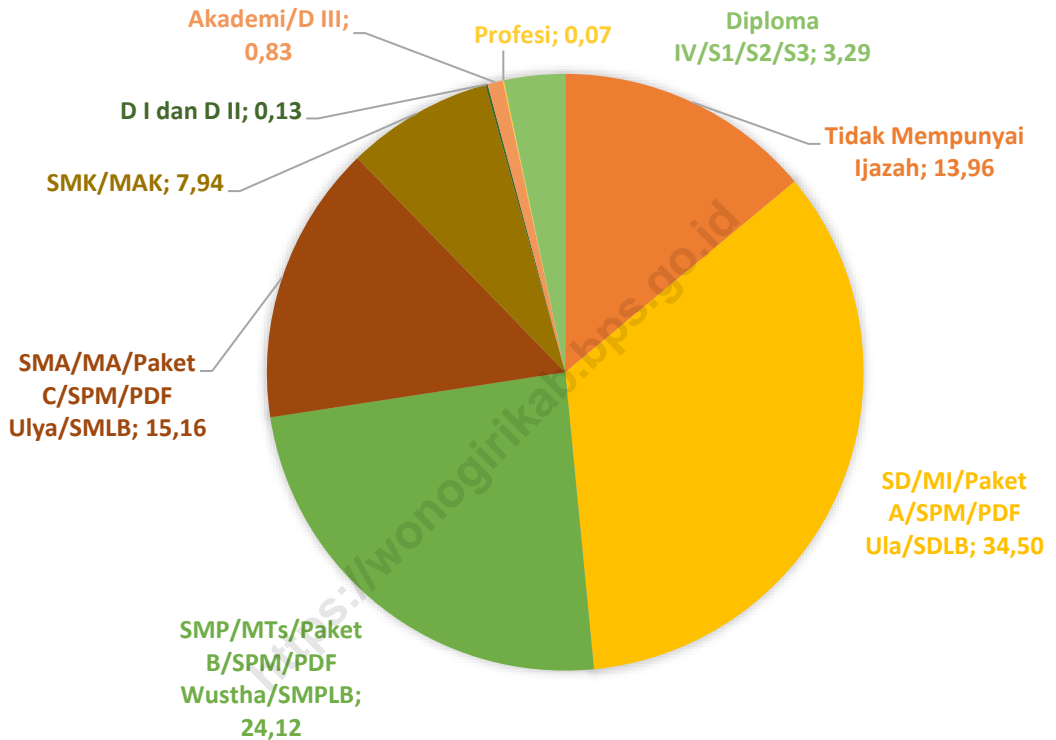
Pendidikan meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Manusia yang berpendidikan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatannya agar dapat hidup lebih lama. Tidak hanya itu, manusia yang berpendidikan juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang mereka.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Hal tersebut dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Seseorang yang menamatkan pendidikan hingga jenjang pendidikan yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan kerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Usaha pemerintah dalam bidang pendidikan di Kabupaten Wonogiri perlu diapresiasi. Berdasarkan hasil Susenas 2022, lebih dari separuh penduduk usia 15 tahun ke atas telah memiliki ijazah tertinggi tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP). Sementara penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan DIV ke atas masih di bawah lima persen. Hal tersebut tentu perlu perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan RLS dan HLS antara lain dengan mempercepat terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas sehingga bisa memperkecil angka putus sekolah, meningkatkan jumlah siswa yang melanjutkan antar jenjang

pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Gambar 4.5 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas menurut Ijasah/STTB Tertinggi yang dimiliki di Kabupaten Wonogiri, 2022 (persen)



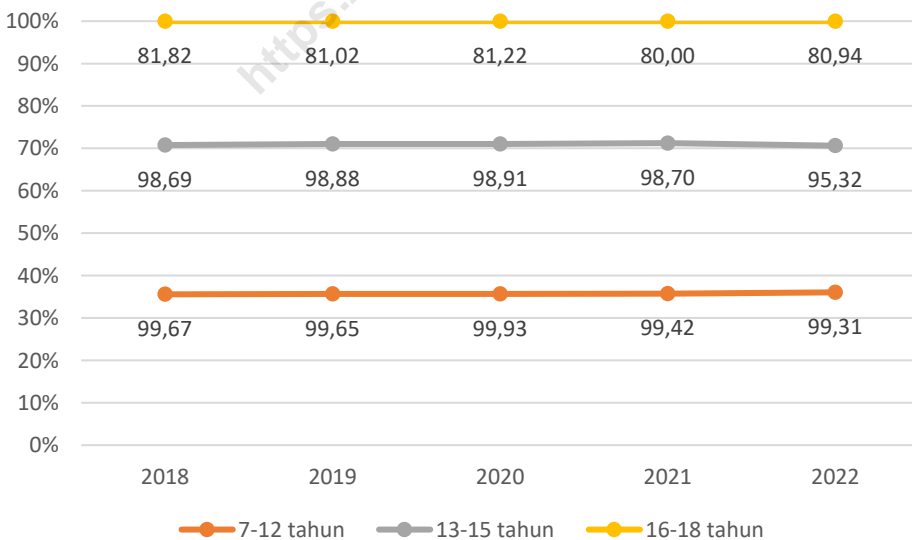
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS

Kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan untuk pembangunan manusia di bidang pendidikan antara lain: Program Indonesia Pintar yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dengan Kartu Indonesia Pintar-nya (KIP) yang bertujuan untuk memberi kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, program revitalisasi fungsi sekolah dengan menerapkan sistem zonasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), serta bantuan perbaikan infrastruktur sekolah yang dikemas dalam bantuan operasional sekolah atau yang lebih dikenal dengan sebutan BOS. Pemerintah Kabupaten Wonogiri selalu berupaya mendorong naiknya angka RLS lebih signifikan; mempertahankan HLS agar *on the track* dan mampu memberikan kontribusi besar terhadap capaian nasional; mempertahankan dan

mengantisipasi penurunan capaian UHH menjadi bagian upaya strategi yang harus dirumuskan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun 2023.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan terhadap akses pendidikan. APS menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Gambar 4.6 memperlihatkan bahwa indikator pendidikan di Kabupaten Wonogiri menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Angka partisipasi sekolah, meskipun lambat namun menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Namun yang patut dicermati yaitu pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun, dimana pada kedua kelompok umur tersebut masih terdapat penduduk yang tidak sedang mengikuti pendidikan formal, bisa karena putus sekolah atau bahkan tidak/belum pernah sekolah. Padahal kedua kelompok umur tersebut merupakan kelompok umur wajib belajar 9 tahun. Dari tahun 2018 hingga 2022 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Wonogiri cenderung naik dari tahun ke tahun di hampir semua kelompok umur. Pada tahun 2022, Angka Partisipasi Sekolah untuk kelompok umur 7 – 12 tahun juga lebih tinggi dibandingkan kelompok umur lain yaitu pada angka 99,31.

Gambar 4.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Wonogiri, 2013 – 2022 (persen)



Sumber: BPS

4.3 Capaian dan Tantangan Bidang Ekonomi

Kapabilitas seseorang dalam ekonomi seringkali terbentur dengan kemiskinan. Faktor kemiskinan dapat menghambat berbagai aspek dalam kehidupan diantaranya aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, padahal kedua aspek tersebut merupakan kapabilitas dasar dalam pembangunan manusia. Sayangnya menanggulangi kemiskinan bukan perkara yang mudah karena terkait dengan berbagai dimensi kehidupan yang saling berpengaruh sama lain.

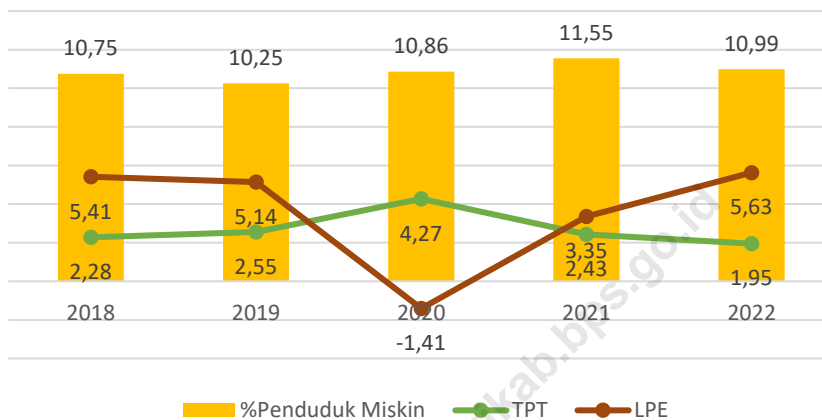
Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sangat diharapkan oleh setiap negara. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara dari tahun ke tahun biasanya menjadi ukuran keberhasilan perekonomian negara tersebut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan bukan hanya menjadi ukuran suatu negara dalam keberhasilan perekonomiannya saja, melainkan juga dapat mengatasi berbagai permasalahan pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan (Todaro, 2000). Penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai merupakan keefektifan kesempatan angkatan kerja. “Kesempatan kerja dapat dikatakan efektif ketika semua tenaga kerja yang tersedia dapat ditampung oleh lapangan pekerjaan yang ada” (Tambunan, 2001:60).

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat menandakan bahwa akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap lapangan kerja. Dengan demikian semakin banyaknya tenaga kerja yang terserap akan mengakibatkan angka pengangguran berkurang dan kemiskinan yang semakin menurun. Namun nyatanya, peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang tidak selalu diikuti dengan peningkatan lapangan pekerjaan. Sehingga mengakibatkan jumlah angka pengangguran masih tergolong tinggi. Angka pengangguran merupakan “persentase jumlah orang yang tidak bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan yang tidak mempunyai pekerjaan disebut penganggur” (Sumarsono, 2009:6).

Masalah pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah utama penghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka pengangguran akan menyebabkan kemiskinan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak memiliki banyak pilihan untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai manusia. Karena miskin, seseorang tidak memiliki

keleluasaan dalam mengakses fasilitas kesehatan yang memadai, terhambat dalam memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas, terbatas dalam memenuhi berbagai kebutuhan pokok, dan sebagainya. Oleh karena itu, tepat kiranya jika pemberantasan kemiskinan menjadi tujuan pertama dalam target SDG's.

Gambar 4.7 Tingkat Pengangguran, Persentase Penduduk Miskin dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri, 2018 – 2022



Sumber: BPS

Sejumlah indikator membaik dan mengarah pada optimisme perekonomian. Kondisi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran Kabupaten Wonogiri pada tahun 2022 sudah menunjukkan arah perbaikan. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonogiri pasca pandemi covid-19 bergerak ke arah yang lebih baik, yaitu tampak dari nilai pengeluaran per kapita yang meningkat (yang merupakan gambaran dari tingkat pendapatannya) serta didukung oleh semakin berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Namun, permasalahan pembangunan tidak biasa dituntaskan hanya dengan mengatasi kemiskinan karena sebenarnya berbagai indikator sosial ekonomi memiliki keterkaitan, misalnya kemiskinan dengan pendidikan. Seseorang terhambat dalam memperoleh pendidikan akibat dampak dari kemiskinan, dan apabila seseorang tidak memiliki pendidikan yang cukup maka ia pun akan sulit memperoleh pekerjaan yang layak sehingga rentan terjerat kemiskinan. Oleh karena itu, hendaknya fokus pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia tidak hanya terpaku pada komponen pembentuk IPM saja, tetapi juga pada berbagai indikator yang memengaruhinya, kemudian dituangkan dalam berbagai bentuk kebijakan dan program kerja.

BAB 5

KESIMPULAN

**IPM Kabupaten
Wonogiri 2022
71,04 tahun**

**Pada tahun 2022, IPM Kabupaten
Wonogiri menempati peringkat ke 22 dari
35 kab/kota, dengan nilai indeks
pembangunan manusia 71,04**

Kesimpulan

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonogiri tahun 2022 telah mencapai 71,04. Dengan capaian IPM itu, Kabupaten Wonogiri berada pada posisi status pembangunan manusia kategori 'tinggi'. Capaian tersebut mengantarkan Kabupaten Wonogiri pada posisi 20 dari 35 kabupaten/kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Jawa Tengah. Meskipun capaian IPM Kabupaten Wonogiri berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah.

Capaian IPM Kabupaten Wonogiri pada tahun 2022 merupakan agregasi dari capaian tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) menunjukkan capaian yang bagus. Saat ini, rata-rata bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 76,41 tahun. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS Kabupaten Wonogiri sebesar 7,42 tahun sehingga bisa dikatakan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Wonogiri yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,42 tahun atau dengan kata lain telah mampu mengenyam pendidikan sampai kelas VII (putus sekolah di kelas VIII). Meskipun pencapaian tersebut masih harus ditingkatkan, namun di sisi lain angka HLS Kabupaten Wonogiri memberikan harapan yang lebih cerah, yaitu mencapai sebesar 12,51 yang memiliki arti bahwa secara rata-rata anak berusia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan pada tahun 2022 diharapkan mampu bersekolah hingga 12,51 tahun atau setara Diploma I. Sedangkan untuk standar hidup layak diukur melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan, dimana untuk Kabupaten Wonogiri pada tahun 2022 naik menjadi Rp. 9.780.000,-.

<https://wonogirikab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

<https://wonogirikab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2016). Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Agustus 2022. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). Analisis Kualitas Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah 2022. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). Jawa Tengah Dalam Angka 2021. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2022. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2021). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2021. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2020). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2020. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2019). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2019. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2028). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2018. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

<https://wonogiri.ac.id/>

<https://wonogirikab.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://wonogirikab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota, 2022

Kab/Kota	UHH (Tahun)	EYS (Tahun)	MYS (Tahun)	Pengeluaran (000Rp)	IPM	Rang- king	Pertum- buhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
JAWA TENGAH	74,57	12,81	7,93	11 377	72,79		0,87
Cilacap	74,07	12,66	7,18	10 904	70,99	22	0,81
Banyumas	73,88	13,21	7,78	11 905	73,17	17	1,01
Purbalingga	73,28	12,01	7,33	10 277	69,54	29	0,56
Banjarnegara	74,37	11,81	6,84	9 776	68,61	33	1,11
Kebumen	73,70	13,36	7,85	9 282	70,79	26	1,06
Purworejo	75,03	13,52	8,32	10 671	73,60	14	0,85
Wonosobo	72,05	11,78	6,88	11 108	68,89	32	0,67
Magelang	74,03	12,58	7,81	10 011	70,85	24	1,04
Boyolali	76,12	12,62	8,08	13 250	74,97	11	0,77
Klaten	76,95	13,40	9,09	12 522	76,95	6	1,09
Sukoharjo	77,82	13,90	9,62	11 841	77,94	5	1,05
Wonogiri	76,41	12,51	7,42	9 780	71,04	20	0,78
Karanganyar	77,64	13,70	8,79	11 798	76,58	7	0,78
Sragen	75,87	12,91	7,79	13 052	74,65	13	0,77
Grobogan	74,93	12,45	7,26	10 610	70,97	23	0,80
Blora	74,60	12,44	7,01	10 067	69,95	28	0,84
Rembang	74,68	12,13	7,41	10 937	71,00	21	0,81
Pati	76,32	12,95	7,79	10 948	73,14	19	1,19
Kudus	76,76	13,25	9,06	11 609	75,89	10	0,97
Jejara	75,97	12,77	8,09	10 913	73,15	18	1,09
Demak	75,52	13,33	8,10	10 698	73,36	15	1,09
Semarang	75,86	13,04	8,05	12 448	74,67	12	0,58
Temanggung	75,70	12,55	7,41	9 773	70,77	27	1,27
Kendal	74,53	12,97	7,71	11 999	73,19	16	0,95
Batang	74,79	12,14	6,90	9 972	69,45	31	0,77
Pekalongan	73,80	12,43	7,46	10 707	70,81	25	1,00
Pemalang	73,65	11,98	6,50	8 994	67,19	34	0,95
Tegal	71,85	12,91	7,25	10 020	69,53	30	1,08
Brebes	69,74	12,15	6,35	10 514	67,03	35	1,07
Kota Magelang	77,02	14,31	10,94	12 816	80,39	4	1,21
Kota Surakarta	77,43	14,89	10,92	15 463	83,08	3	0,56
Kota Salatiga	77,72	15,43	10,95	16 351	84,35	1	0,90
Kota Semarang	77,69	15,54	10,80	16 047	84,08	2	0,63
Kota Pekalongan	74,51	12,86	9,20	13 158	75,90	9	0,66
Kota Tegal	74,64	13,08	9,00	13 455	76,15	8	0,83

Lampiran 2. Tren Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2018-2022

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JAWA TENGAH	71,12	71,73	71,87	72,16	72,79
Cilacap	69,56	69,98	69,95	70,42	70,99
Banyumas	71,3	71,96	71,98	72,44	73,17
Purbalingga	68,41	68,99	68,97	69,15	69,54
Banjarnegara	66,54	67,34	67,45	67,86	68,61
Kebumen	68,8	69,60	69,81	70,05	70,79
Purworejo	71,87	72,50	72,68	72,98	73,60
Wonosobo	67,81	68,27	68,22	68,43	68,89
Magelang	69,11	69,87	69,87	70,12	70,85
Boyolali	73,22	73,80	74,25	74,40	74,97
Klaten	74,79	75,29	75,56	76,12	76,95
Sukoharjo	76,07	76,84	76,98	77,13	77,94
Wonogiri	69,37	69,98	70,25	70,49	71,04
Karanganyar	75,54	75,89	75,86	75,99	76,58
Sragen	72,96	73,43	73,95	74,08	74,65
Grobogan	69,32	69,86	69,87	70,41	70,97
Blora	67,95	68,65	68,84	69,37	69,95
Rembang	69,46	70,15	70,02	70,43	71,00
Pati	70,71	71,35	71,77	71,77	73,14
Kudus	74,58	74,94	75,00	75,00	75,89
Jepara	71,38	71,88	71,99	71,99	73,15
Demak	71,26	71,87	72,22	72,22	73,36
Semarang	73,61	74,14	74,10	74,10	74,67
Temanggung	68,83	69,56	69,57	69,57	70,77
Kendal	71,28	71,97	72,29	72,29	73,19
Batang	67,86	68,42	68,65	68,65	69,45
Pekalongan	68,97	69,71	69,63	69,63	70,81
Pemalang	65,67	66,32	66,32	66,32	67,19
Tegal	67,33	68,24	68,39	68,39	69,53
Brebes	65,68	66,12	66,11	66,11	67,03
Kota Magelang	78,31	78,80	78,99	78,99	80,39
Kota Surakarta	81,46	81,86	82,21	82,21	83,08
Kota Salatiga	82,41	83,12	83,14	83,14	84,35
Kota Semarang	82,72	83,19	83,05	83,05	84,08
Kota Pekalongan	74,24	74,77	74,98	74,98	75,90
Kota Tegal	74,44	74,93	75,07	75,07	76,15

Lampiran 3. Tren Komponen Umur Harapan Hidup (UHH)* di Jawa Tengah 2018-2022

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JAWA TENGAH	74,18	74,23	74,37	74,47	74,57
Cilacap	73,39	73,52	73,73	73,90	74,07
Banyumas	73,45	73,55	73,72	73,80	73,88
Purbalingga	72,98	73,02	73,14	73,21	73,28
Banjarnegara	73,91	74,01	74,18	74,28	74,37
Kebumen	73,11	73,22	73,40	73,55	73,70
Purworejo	74,40	74,52	74,72	74,87	75,03
Wonosobo	71,46	71,60	71,82	71,94	72,05
Magelang	73,47	73,56	73,72	73,88	74,03
Boyolali	75,79	75,83	75,95	76,03	76,12
Klaten	76,67	76,68	76,78	76,86	76,95
Sukoharjo	77,54	77,55	77,65	77,73	77,82
Wonogiri	76,05	76,07	76,16	76,28	76,41
Karanganyar	77,36	77,38	77,47	77,55	77,64
Sragen	75,60	75,62	75,71	75,79	75,87
Grobogan	74,55	74,61	74,75	74,84	74,93
Blora	74,12	74,23	74,41	74,51	74,60
Rembang	74,39	74,43	74,55	74,61	74,68
Pati	75,93	76,04	76,22	76,27	76,32
Kudus	76,47	76,50	76,60	76,68	76,76
Jepara	75,71	75,74	75,84	75,91	75,97
Demak	75,29	75,31	75,40	75,46	75,52
Semarang	75,62	75,63	75,73	75,79	75,86
Temanggung	75,47	75,48	75,58	75,64	75,70
Kendal	74,30	74,33	74,43	74,48	74,53
Batang	74,56	74,59	74,69	74,74	74,79
Pekalongan	73,53	73,57	73,69	73,74	73,80
Pemalang	73,11	73,22	73,40	73,53	73,65
Tegal	71,28	71,40	71,60	71,72	71,85
Brebes	68,84	69,04	69,33	69,54	69,74
Kota Magelang	76,72	76,75	76,85	76,93	77,02
Kota Surakarta	77,11	77,12	77,22	77,32	77,43
Kota Salatiga	77,11	77,22	77,40	77,55	77,72
Kota Semarang	77,23	77,25	77,34	77,51	77,69
Kota Pekalongan	74,25	74,28	74,38	74,44	74,51
Kota Tegal	74,30	74,34	74,46	74,54	74,64

*Hasil Proyeksi SP2010

Lampiran 4. Tren Komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) di Jawa Tengah 2018-2022

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JAWA TENGAH	12,63	12,68	12,70	12,77	12,81
Cilacap	12,48	12,49	12,50	12,63	12,66
Banyumas	12,64	12,82	12,85	13,03	13,21
Purbalingga	11,95	11,98	11,99	12,00	12,01
Banjarnegara	11,42	11,45	11,46	11,63	11,81
Kebumen	12,91	13,04	13,34	13,35	13,36
Purworejo	13,48	13,49	13,50	13,51	13,52
Wonosobo	11,69	11,74	11,75	11,76	11,78
Magelang	12,48	12,53	12,54	12,55	12,58
Boyolali	12,16	12,43	12,56	12,57	12,62
Klaten	13,13	13,24	13,25	13,39	13,40
Sukoharjo	13,81	13,82	13,83	13,84	13,90
Wonogiri	12,45	12,48	12,49	12,50	12,51
Karanganyar	13,66	13,67	13,68	13,69	13,70
Sragen	12,65	12,69	12,83	12,84	12,91
Grobogan	12,28	12,29	12,30	12,44	12,45
Blora	12,14	12,19	12,20	12,35	12,44
Rembang	12,05	12,10	12,11	12,12	12,13
Pati	12,30	12,41	12,65	12,94	12,95
Kudus	13,21	13,22	13,23	13,24	13,25
Jepara	12,71	12,74	12,75	12,76	12,77
Demak	12,86	13,01	13,31	13,32	13,33
Semarang	12,85	12,94	12,97	12,98	13,04
Temanggung	12,08	12,13	12,14	12,32	12,55
Kendal	12,70	12,80	12,95	12,96	12,97
Batang	11,88	12,00	12,01	12,13	12,14
Pekalongan	12,17	12,40	12,41	12,42	12,43
Pemalang	11,91	11,94	11,95	11,96	11,98
Tegal	12,34	12,58	12,67	12,89	12,91
Brebes	12,02	12,03	12,04	12,05	12,15
Kota Magelang	13,80	13,81	14,14	14,15	14,31
Kota Surakarta	14,52	14,55	14,87	14,88	14,89
Kota Salatiga	15,00	15,34	15,41	15,42	15,43
Kota Semarang	15,50	15,51	15,52	15,53	15,54
Kota Pekalongan	12,79	12,83	12,84	12,85	12,86
Kota Tegal	12,90	13,04	13,05	13,07	13,08

Lampiran 5. Tren Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Jawa Tengah 2018-2022

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JAWA TENGAH	7,35	7,53	7,69	7,75	7,93
Cilacap	6,92	6,93	6,97	7,09	7,18
Banyumas	7,41	7,42	7,52	7,63	7,78
Purbalingga	7,00	7,14	7,24	7,25	7,33
Banjarnegara	6,28	6,50	6,74	6,75	6,84
Kebumen	7,34	7,53	7,54	7,55	7,85
Purworejo	7,70	7,91	8,12	8,21	8,32
Wonosobo	6,75	6,76	6,81	6,82	6,88
Magelang	7,57	7,77	7,78	7,79	7,81
Boyolali	7,55	7,56	7,84	7,85	8,08
Klaten	8,24	8,31	8,58	8,81	9,09
Sukoharjo	8,84	9,10	9,34	9,35	9,62
Wonogiri	6,88	7,04	7,33	7,34	7,42
Karanganyar	8,51	8,52	8,56	8,57	8,79
Sragen	7,22	7,34	7,65	7,66	7,79
Grobogan	6,67	6,86	6,91	7,11	7,26
Blora	6,46	6,58	6,83	6,99	7,01
Rembang	6,95	7,15	7,16	7,30	7,41
Pati	7,18	7,19	7,44	7,48	7,79
Kudus	8,62	8,63	8,75	8,76	9,06
Jepara	7,43	7,44	7,68	7,79	8,09
Demak	7,48	7,55	7,71	7,86	8,10
Semarang	7,88	8,01	8,02	8,03	8,05
Temanggung	6,94	7,15	7,24	7,25	7,41
Kendal	7,05	7,25	7,45	7,46	7,71
Batang	6,62	6,63	6,87	6,88	6,90
Pekalongan	6,74	6,88	6,91	7,17	7,46
Pemalang	6,32	6,41	6,42	6,45	6,50
Tegal	6,70	6,86	6,98	6,99	7,25
Brebes	6,19	6,20	6,21	6,22	6,35
Kota Magelang	10,31	10,33	10,39	10,62	10,94
Kota Surakarta	10,53	10,54	10,69	10,90	10,92
Kota Salatiga	10,40	10,41	10,42	10,66	10,95
Kota Semarang	10,51	10,52	10,53	10,78	10,80
Kota Pekalongan	8,57	8,71	8,96	9,18	9,20
Kota Tegal	8,30	8,31	8,51	8,73	9,00

Lampiran 6. Tren Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan di Jawa Tengah
2018-2022 (Ribuan Rupiah)

Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JAWA TENGAH	10 777	11 102	10 930	11 034	11 377
Cilacap	10 274	10 639	10 440	10 534	10 904
Banyumas	11 240	11 703	11 448	11 546	11 905
Purbalingga	9 786	10 131	9 914	10 032	10 277
Banjarnegara	9 160	9 547	9 263	9 407	9 776
Kebumen	8 757	9 066	8 901	9 028	9 282
Purworejo	10 048	10 342	10 163	10 275	10 671
Wonosobo	10 503	10 871	10 621	10 760	11 108
Magelang	9 025	9 387	9 301	9 440	10 011
Boyolali	12 758	13 079	12 910	13 031	13 250
Klaten	11 738	12 074	11 921	12 017	12 522
Sukoharjo	11 100	11 557	11 325	11 428	11 841
Wonogiri	9 117	9 426	9 286	9 429	9 780
Karanganyar	11 223	11 569	11 428	11 509	11 798
Sragen	12 391	12 720	12 589	12 679	13 052
Grobogan	10 097	10 350	10 221	10 294	10 610
Blora	9 385	9 795	9 571	9 669	10 067
Rembang	10 191	10 551	10 328	10 519	10 937
Pati	10 190	10 660	10 390	10 506	10 948
Kudus	10 979	11 318	11 160	11 272	11 609
Jepara	10 169	10 609	10 343	10 536	10 913
Demak	10 001	10 344	10 128	10 248	10 698
Semarang	11 807	12 116	11 966	12 070	12 448
Temanggung	9 142	9 489	9 343	9 408	9 773
Kendal	11 257	11 597	11 425	11 608	11 999
Batang	9 203	9 573	9 431	9 524	9 972
Pekalongan	10 221	10 508	10 312	10 409	10 707
Pemalang	8 186	8 546	8 461	8 573	8 994
Tegal	9 433	9 798	9 612	9 700	10 020
Brebes	9 890	10 238	10 058	10 152	10 514
Kota Magelang	11 994	12 514	12 210	12 349	12 816
Kota Surakarta	14 528	15 049	14 761	14 911	15 463
Kota Salatiga	15 464	15 944	15 699	15 843	16 351
Kota Semarang	14 895	15 550	15 243	15 425	16 047
Kota Pekalongan	12 312	12 680	12 467	12 598	13 158
Kota Tegal	12 830	13 250	12 999	13 143	13 455

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOGIRI**

Jalan Pelem II No. 8 Wonogiri 57612

Telp (0273) 321055, Faks (0273) 321055

Homepage: <http://wonogirikab.bps.go.id> E-mail: bps3312@bps.go.id